



KEMENTERIAN KEUANGAN
KPKNL SURAKARTA

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2021



NILAI-NILAI KEMENTERIAN KEUANGAN

<i>INTEGRITAS</i>	Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
<i>PROFESIONALISME</i>	Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
<i>SINERGI</i>	Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
<i>PELAYANAN</i>	Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.
<i>KESEMPURNAAN</i>	Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

DAFTAR ISI

Nilai-Nilai Kementerian Keuangan	i
Daftar Isi	ii
Kata Pengantar	iii
Ringkasan Eksekutif	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	1
C. Sarana, Prasarana dan Sumber Daya Manusia.....	2
D. Aspek Strategis	5
E. Sistematika Laporan	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. Capaian Kinerja Organisasi	12
B. Realisasi Anggaran	29
BAB IV PENUTUP	31
DAFTAR LAMPIRAN	
▪ LAMPIRAN 1 : FORMULIR PENGUKURAN KINERJA	
▪ LAMPIRAN 2 : PERJANJIAN KINERJA	

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta tahun 2021 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis DJKN pada tingkat KPKNL Tahun Anggaran 2021. Laporan Kinerja ini sekaligus menjadi alat monitoring dan evaluasi kinerja KPKNL Surakarta dalam melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di Bidang Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang.

Laporan Kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini dapat berfungsi sebagai alat untuk menilai kinerja KPKNL Surakarta secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas, transparansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka perwujudan *good governance*. Selain itu, Laporan Kinerja juga merupakan alat kendali serta berfungsi sebagai *feedback* untuk merumuskan kebijakan dalam rangka memacu peningkatan kinerja organisasi.

Sesuai dengan pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016, KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJKN menetapkan visi untuk tahun 2021 adalah *“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”* Visi tersebut selanjutnya menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021. RKT Tahun 2021 berfungsi sebagai rencana kerja operasional dan kuantitatif yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang.

Bahwa KPKNL Surakarta pada Tahun Anggaran 2021 ini sedang berusaha untuk meraih predikat Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani WBBM sebagai tindak

lanjut keberhasilan meraih predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang telah diraih KPKNL Surakarta pada tahun 2019. Sebagai predikat tertinggi dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada public, yaitu pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, KPKNL Surakarta telah melakukan berbagai perubahan dan inovasi demi tercapainya predikat tersebut. Tetapi untuk tahun 2021 ini KPKNL Surakarta belum berhak untuk menyandang predikat tersebut dan akan mencapainya pada Tahun 2022 yang akan datang.

Berdasarkan laporan capaian kinerja tahun 2021, KPKNL Surakarta memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 109,48%. NKO tersebut merupakan hasil perhitungan capaian IKU/Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three*, dengan rincian sebanyak 19 (Sembilan belas) IKU hijau, 1 (dua) IKU Kuning dan 2 (dua) IKU abu-abu. Hasil tersebut merupakan capaian kinerja KPKNL Surakarta sesuai dengan Peta Strategi KPKNL Tahun 2021.

Kami harapkan Laporan Kinerja ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPKNL Surakarta tahun 2021 dan menjadi tolok ukur kegiatan di tahun berikutnya. Kepada semua pegawai yang telah menyumbangkan karsa dan karya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja KPKNL Surakarta, kami sampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Kami sampaikan terima kasih pula kepada para Kepala Seksi dan Kepala Subbagian Umum KPKNL Surakarta yang telah memberikan data-data yang diperlukan untuk penyusunan Laporan Kinerja ini. Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami akan menerima dan mempertimbangkan saran/usulan dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas Laporan Kinerja tahun berikutnya.

Kepala Kantor

Adi Wibowo

RINGKASAN EKSEKUTIF

A. Target dan Realisasi

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta tahun 2021 merupakan ikhtisar capaian kinerja KPKNL Surakarta selama tahun 2021. Laporan Kinerja ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas kinerja yang dilaksanakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang kepada *stakeholders*. Laporan Kinerja ini merupakan gambaran capaian kinerja selama tahun 2021 pada KPKNL Surakarta, sehingga laporan ini dapat berfungsi sebagai bahan monitoring dan evaluasi serta basis perencanaan kinerja tahun berikutnya dalam rangka pencapaian misi DJKN.

Sesuai dengan Peta Strategi KPKNL Surakarta tahun 2021, telah ditetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dan dijabarkan dalam 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* KPKNL Surakarta tahun 2021.

Capaian kinerja 22 (dua puluh dua) yang tersebut adalah sebagai berikut:

Kode	IKU	Target s.d. Q4	Realisasi s.d. Q4	Indeks Max. 120%
	Stakeholder Perspective(25%)			27.06%
1	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal			108.23%
1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%	66.21%	106.79%
1b-CP	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	98.44%	98.44%
1c-CP	Persentase Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017)	100%	168.87%	120.00%
	Customer Perspective(15%)			15.60%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa			105.43%
2a-CP	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	88.00	95.27	108.26%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	103.20%	103.20%

Kode	IKU	Target s.d. Q4	Realisasi s.d. Q4	Indeks Max. 120%
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien			102.56%
3a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	4.30	4.41	102.56%
	Internal Process Perspective (30%)			32.98%
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif			109.46%
4a-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	100%	100.75%	100.75%
4b-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100%	111.11%	111.11%
4c-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	22%	2.15%	120.00%
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif			108.24%
5a-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	100%	100.57%	100.57%
5b-CP	Persentase produktivitas lelang	35.00%	36.60%	104.56%
5c-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	92.00%	99.20%	107.83%
5d-CP	Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	12.50%	0.86%	120.00%
6	Edukasi yang efektif			104.43%
6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	89	92.94	104.43%
7	Pengawasan dan pengendalian yang efektif			117.65%
7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%	100.00%	117.65%
7b-CP	Persentase Rekomendasi hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti			abu-abu
	Learning & Growth Perspective (30%)			33.84%
8	SDM yang kompeten			120.00%
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120.00%	120.00%
9	Organisasi yang fit for purpose			117.93%
9a-N	Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK/WBBM	85	97.43	114.62%
9b-N	Nilai hasil review pengelolaan kinerja	75	89.64	119.52%
11c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80	95.73	119.66%

Kode	IKU	Target s.d. Q4	Realisasi s.d. Q4	Indeks Max. 120%
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal			100.50%
10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95.5%	95.98%	100.50%
10b-N	Persentase tindaklanjut temuan BA 15			abu-abu
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)				109.48%

B. Langkah-langkah Antisipatif

Langkah-langkah antisipatif ke depan yang harus dilakukan oleh KPKNL Surakarta untuk meningkatkan kinerja pada tahun 2022 mendatang, antara lain adalah:

1. Terus meningkatkan sosialisasi dan komunikasi yang intensif antara KPKNL dengan satuan kerja Kementerian/Lembaga dalam pengelolaan dan penatausahaan BMN sehingga tercapai hasil yang optimal;
2. Meningkatkan koordinasi dan mendorong komunikasi yang lebih efektif antara KPKNL, satker dan Kantor Pertanahan dalam rangka sertifikasi tanah BMN;
3. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antara KPKNL dengan Penyerah Piutang, serta sosialisasi piutang Negara pada Kementerian/Lembaga, tata cara penyerahan dan pengurusannya;
4. Inovasi/terobosan/ide baru dalam pengurusan piutang Negara, misalnya penagihan dengan pendekatan sosial/keagamaan.
5. Mengintensifkan upaya pemasaran obyek lelang bekerja sama dengan pemohon lelang untuk meningkatkan produktivitas lelang;
6. Sosialisasi layanan permohonan lelang online kepada *stakeholders* lelang;
7. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi Penilai melalui diklat maupun *knowledge sharing* untuk menjaga dan meningkatkan pengetahuan para penilai;
8. Asistensi, monitoring dan evaluasi pengelolaan DIPA dari Subbagian Umum kepada seksi-seksi/unit lain untuk menjaga kualitas pelaksanaan anggaran;
9. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pegawai pada tugas-tugas Seksi Kepatuhan Internal;
10. Meningkatkan peran fungsi kehumasan dalam menyebarluaskan informasi tugas dan fungsi KPKNL Surakarta.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah, dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. KPKNL Surakarta yang sebelumnya bernama Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Surakarta berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 445/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara dan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara.

Kemudian saat ini, Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 170/PMK.01/2012 tanggal 06 November 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, KPKNL Surakarta mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Wilayah kerja KPKNL Surakarta meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri.

Salah satu azas umum penyelenggaraan Negara yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran instansi.

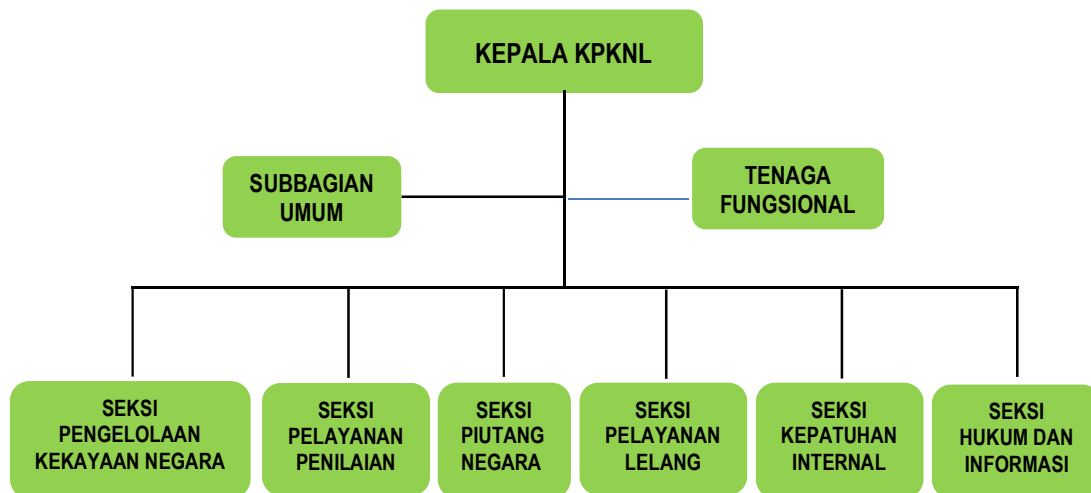
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan

negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Selanjutnya Pasal 31 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas, KPKNL menyelenggarakan fungsi:

- a. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
- b. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;
- d. penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau penjamin hutang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;
- e. pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
- h. pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;
- i. pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain;
- j. pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat lelang;
- k. inventarisasi, pengamanan dan pendayagunaan barang jaminan;
- l. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;
- m. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- n. pelaksanaan administrasi KPKNL.

Struktur Organisasi KPKNL berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut terdiri dari :



C. Sarana, Prasarana dan Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPKNL Surakarta didukung oleh sarana, prasarana dan sumber daya manusia sebagai berikut:

1. Sarana dan Prasarana

Sarana berupa sebidang tanah dan gedung kantor yang cukup representatif dengan luas 2.000 m² tersebut dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 29 atas nama Departemen Keuangan Republik Indonesia, terletak di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, setempat dikenal dengan Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 141 Sumber, Surakarta. Selain itu, KPKNL Surakarta juga memiliki tanah seluas 1.043 m² yang berasal dari penyerahan KPPN Surakarta berikut 7 (tujuh) buah bangunan rumah negara yang pada tahun 2018 lalu telah direnovasi. Tanah tersebut terdaftar dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 44 atas nama Departemen Keuangan Republik Indonesia, terletak di Jalan Melon Raya Gang Blewah XIII, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta.

Prasarana yang ada terdiri dari kendaraan dinas dan peralatan perkantoran di antaranya komputer, laptop dan peralatan lainnya.

Adapun prasarana yang ada antara lain adalah:

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Kendaraan roda 2	5	5	-	-
2	Kendaraan roda 4	5	5	-	-
3	Komputer dan laptop	73	58	10	5
4	Perangkat Jaringan	11	4	1	6

Sarana dan prasarana yang ada tersebut telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Surakarta sehingga dapat berlangsung dengan baik dan lancar.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang ada di KPKNL Surakarta sebanyak 46 (empat puluh enam) orang pegawai dengan latar belakang pendidikan, usia, jenis kelamin maupun kepangkatan dan keahlian dengan sebaran di masing-masing seksi sebagai berikut :

Komposisi SDM berdasar Kepangkatan

No	Gol	Kepala Kantor	Sub Bagian / Seksi								Jml
			Umu m	PK N	Penilaian	P N	Lelan g	H I	K I	Fungsio nal	
1	IV	1	-		1	1	-	-	-	-	3
2	III	-	7	6	1	4	5	5	4	7	39
3	II	-	2	0	0	-	-	1	-	1	4
4	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		1	9	6	2	5	5	6	4	7	46

Komposisi SDM berdasar Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Kepala Kantor	Sub Bagian / Seksi								J ml
			Umu m	PK N	Penilai an	P N	Lelan g	H I	K I	Fungsio nal	
1	Laki-laki	1	7	4	2	4	2	6	4	6	36
2	Perempu an	-	2	2	-	1	3	-	-	2	10
Jumlah		1	9	6	2	5	5	5	4	5	46

Komposisi SDM berdasar Pendidikan

No	Pendidik an	Kepala Kantor	Sub Bagian / Seksi								J ml
			Umu m	PK N	Penilai an	P N	Lelan g	H I	K I	Fungsio nal	
1	S-2	1	-	1	1	1	-	1	1	1	7
2	S-1	-	4	3	1	3	3	2	3	6	25
3	D-IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	D-III	-	2	2	-	-	1	3	-	1	9
5	D-I	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
6	SLTA	-	1	-	-	1	1	-	-	-	3
Jumlah		1	9	6	2	5	5	6	4	8	46

Komposisi SDM berdasar Usia

No	Usia	Kepala Kantor	Sub Bagian / Seksi								Jml
			Umum	PKN	Penilaian	PN	Lelang	HI	KI	Fungsional	
1	18 - 30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
2	31 - 40	-	6	4	1	1	1	4	2	4	23
3	41 - 50	1	2	2	1	2	4	2	2	1	17
4	Diatas 50	-	1	-	-	2	-	-	-	2	5
Jumlah		1	9	6	2	5	5	5	4	8	46

Tenaga Fungsional

No	Jabatan Fungsional	Kepala Kantor	Sub Bagian / Seksi							Jml
			Umum	PKN	Penilaian	PN	Lelang	HI	KI	
1	Pejabat Lelang	-	-	-	-	-	4	-	-	4
2	Penilai	-	-	-	3	-	-	-	-	3
3	Jurusita	1	1	-	-	1	2	1	-	6
4	Pemeriksa	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Jumlah		1	1	-	3	1	7	1	-	14

Komposisi Pegawai Per Subbagian/Seksi

	Umum	PKN	Penilaian	PN	Lelang	HI	KI	Jml
Eselon III	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon IV	1	1	1	1	1	1	1	7
Pelaksana	8	5	1	4	4	5	3	30
Jumlah	9	6	2	5	5	6	4	37

D. Aspek Strategis

Transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan merupakan implementasi sekaligusantisipasi dalam menghadapi dinamika perkembangan organisasi. Pada cetak biru transformasi kelembagaan tersebut, aspek strategis DJKN meliputi inisiatif strategis dalam fungsi perbendaharaan dan fungsi *special mission*. Fungsi perbendaharaan atau fungsi pengelolaan kekayaan Negara meliputi kegiatan penilaian, inventarisasi dan

pengelolaan kekayaan Negara. Sedangkan *special mission* merujuk pada fungsi Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) dalam melakukan pengelolaan BUMN sebagai instrumen investasi pemerintah. Pada level KPKNL, aspek strategis dalam fungsi perbendaharaan lebih berperan. Aspek strategis tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Melakukan Pengelolaan Kekayaan Negara

Peran strategis KPKNL Surakarta sebagai pengelola kekayaan negara adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara di wilayah kerja KPKNL Surakarta. Peningkatan daya guna dan hasil guna terutama difokuskan pada nilai manfaat ekonomi dan utilisasi kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara, penyusunan dan penyempurnaan peraturan, pembinaan dan penatausahaan kekayaan negara. Sebagai asset manager, KPKNL Surakarta mengemban tugas untuk menata aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN, yaitu melalui optimalisasi aset dalam peningkatan pendapatan negara, penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan, serta peningkatan alternatif pembiayaan negara melalui instrumen penerbitan SUKUK. Fokus kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi kegiatan optimalisasi pengelolaan BMN yang mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional khususnya dalam menggerakkan sektor ekonomi mikro yang terdampak Covid19. Saat ini titik berat kegiatan pengelolaan kekayaan Negara adalah memberikan kemudahan dan penyesuaian tarif dalam rangka pemanfaatan BMN oleh UKM, melakukan pengukuran kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang/Standar Kebutuhan (SBSK) guna efisiensi belanja pemeliharaan serta masih dilakukannya identifikasi dan sertifikasi BMN berupa tanah pada Kementerian/Lembaga sebagai tindak lanjut penatausahaan dan pengelolaan BMN menuju tertib fisik, tertib administrasi dan tertib hukum.

2. Memberikan Pelayanan Penilaian

Peran Strategis KPKNL Surakarta di bidang penilaian adalah memberikan pelayanan penilaian dalam rangka mendapatkan nilai wajar untuk keperluan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), nilai likuidasi untuk keperluan penghapusan BMN dan nilai wajar lainnya untuk keperluan pemanfaatan BMN.

3. Memberikan Pelayanan Pengurusan Piutang Negara

Peran Strategis KPKNL Surakarta di bidang piutang negara adalah dalam rangka menyelamatkan keuangan negara yang dilakukan dengan melakukan pengurusan piutang negara yang berasal dari piutang instansi pemerintah.

Instansi Pemerintah sebagai Penyerah Piutang di wilayah kerja KPKNL Surakarta antara lain sebagai berikut:

- Direktorat PKNSI Kantor Pusat DJKN
- RS Ortopedi dr. Soeharso Surakarta
- RSUP Soeradji Tirtonegoro Klaten
- RSUP Sardjito Yogyakarta
- RSUD Moewardi Surakarta
- RSUD Bagas Waras Klaten
- Pemda Kabupaten Wonogiri dan Kab. Klaten
- Kementerian Perindustrian
- Kementerian UKM dan Koperasi
- Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Kementerian Kehutanan cq. PT. BPD Jateng Cabang Sragen,

4. Memberikan Pelayanan Lelang

Peran strategis KPKNL Surakarta di bidang pelayanan lelang adalah memberikan pelayanan permohonan lelang dari para pengguna jasa lelang (*stake holder*). Lelang yang dilaksanakan adalah lelang eksekusi maupun non eksekusi sebagai sarana jual beli yang transparan, akuntabel, kompetitif, efisien dan lebih menjamin kepastian hukum. Risalah Lelang yang merupakan akta otentik berfungsi sebagai *akta van transport* untuk kepentingan peralihan hak. KPKNL Surakarta sebagai instansi vertikal DJKN di daerah diharapkan menjadi akselerator agar lelang dapat lebih dikenal dan diminati masyarakat, sehingga menjadi sarana transaksi pilihan dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.

5. Memberikan kontribusi Pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Dalam memberikan pelayanan di bidang piutang negara dan lelang, KPKNL Surakarta memperoleh hasil berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara dan bea lelang yang merupakan salah satu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Selain itu, KPKNL Surakarta juga turut berperan menyumbang PNBP yang berasal dari pengelolaan kekayaan Negara yang berada pada satuan kerja Kementerian/Lembaga.

E. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja KPKNL Surakarta tahun 2021 ini adalah sebagai berikut:

- Bab I. Pendahuluan
- Bab II. Perencanaan Kinerja
- Bab III. Akuntabilitas Kinerja
- Bab IV. Penutup

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu perjanjian kinerja. Perencanaan kinerja diperlukan untuk menentukan arah kegiatan dan mengukur tingkat keberhasilan kinerja organisasi. Perjanjian kinerja sendiri merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh organisasi.

Mengacu pada visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), “Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, maka ditetapkanlah misi KPKNL Surakarta sebagai berikut:

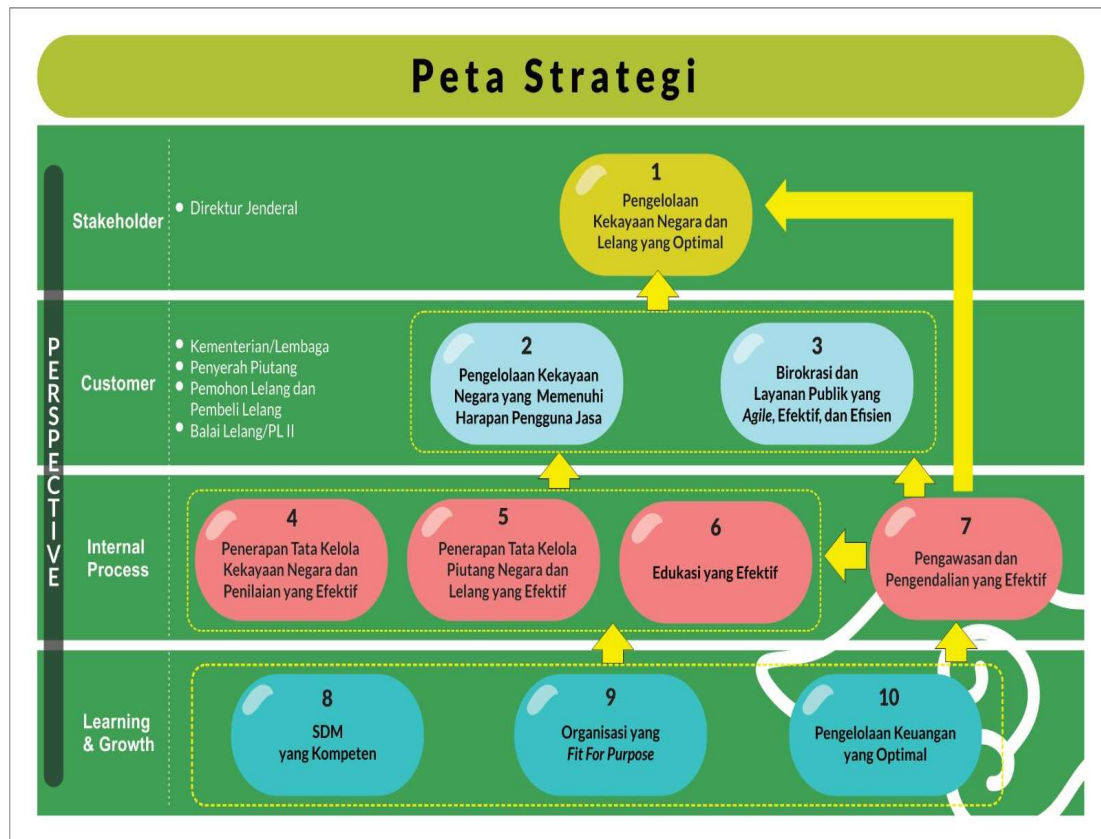
1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara.
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi sebagaimana disebutkan di atas, KPKNL Surakarta telah menetapkan 10 (sepuluh) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai pada tahun 2021, sebagai berikut:

1. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal;
2. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa;
3. Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien;
4. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif;
5. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif;
6. Edukasi yang Efektif;
7. Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif;
8. SDM yang Kompeten;
9. Organisasi yang Fit For Purpose;
10. Pengelolaan Keuangan yang Optimal;

Peta Strategi KPKNL Surakarta

Tahun 2021



Peta strategi KPKNL menetapkan 4 perspektif, yaitu :

1. *Stakeholder Perspective*, berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh *stakeholder*.
2. *Customer Perspective*, berisi ekspektasi dari *customer*/pengguna jasa dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilakukan.
3. *Internal Process Perspective*, berisi proses bisnis yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan.
4. *Learning and Growth Perspective*, berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang diharapkan.

Sasaran Strategis (SS) yang tertuang dalam peta strategi KPKNL tahun 2021 tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diidentifikasi sebanyak 22 (dua puluh dua) IKU. Rincian Sasaran Strategis dan IKU KPKNL Surakarta tahun 2021 adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS DAN IKU

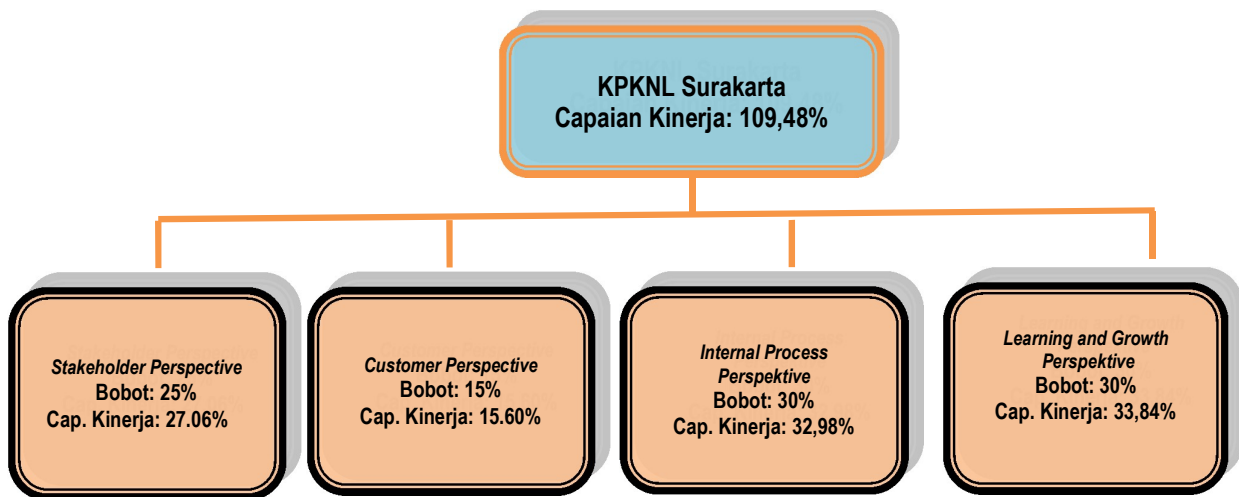
No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	1a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%
		1b-CP Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	100%
		1c-CP Persentase Penurunan Nilai <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	88
		2b-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
3.	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	3a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,3
4.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif	4a-CP Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi	100%
		4b-CP Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
		4c-CP Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian	22%
5.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	5a-CP Persentase Efektivitas Penyelesaian BKN	100%
		5b-CP Persentase Produktivitas Lelang	35%
		5c-CP Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%
		5d-CP Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	12,5%
6.	Edukasi yang Efektif	6a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	89
7.	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	7a-CP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%
		7b-CP Persentase Rekomendasi hasil Pengawasan yang diindaklanjuti	-
8.	SDM yang Kompeten	8a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
9.	Organisasi yang Fit For Purpose	9a-N Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM	85
		9b-N Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	75
		9c-N Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80
10.	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	10a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%
		10b-N Persentase tindaklanjut temuan BA 15	-

Program/Kegiatan	Anggaran
Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	Rp243.197.000,00
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp5.880.000,00
2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp20.364.000,00
3. Pengelolaan Aset	Rp216.953.000,00
4. Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	-
5. Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	-
6. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	-
Dukungan Manajemen	Rp1.611.399.000,00
1. Legislasi dan Litigasi	Rp68.512.000,00
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp1.535.231.000,00
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp2.496.000,00
4. Pengelolaan Organisasi dan SDM	-
5. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp5.160.000,00
6. Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Organisasi diukur dengan cara membanding antara target/rencana dengan capaian/realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Surakarta tahun 2021 adalah 109,48%. NKO tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagai berikut:



Sebagaimana telah disebutkan pada BAB II, pada tahun 2021 KPKNL Surakarta telah menetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Strategis (SS) dan 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan data capaian kinerja tahun 2021, 19 (sembilan belas) IKU tersebut berstatus hijau (capaian/realisasi $\geq 100\%$), 1 (satu) IKU berstatus Kuning, dan 2 (dua) IKU abu-abu. Rincian capaian kinerja atas 10 (sepuluh) SS dan 22 (dua puluh dua) IKU tersebut adalah sebagai berikut:

Kode	IKU	Target 2021	Realisasi 2021	Indeks Max. 120%
	Stakeholder Perspective(25%)			27.06%
1	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal			108.23%
1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%	66.21%	106.79%
1b-CP	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	98.44%	98.44%

Kode	IKU	Target 2021	Realisasi 2021	Indeks Max. 120%
1c-CP	Persentase Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017)	100%	168.87%	120.00%
	Customer Perspective(15%)			15.60%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa			105.43%
2a-CP	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	88.00	95.27	108.26%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	103.20%	103.20%
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien			102.56%
3a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	4.30	4.41	102.56%
	Internal Process Perspective (30%)			32.98%
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif			109.46%
4a-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	100%	100.75%	100.75%
4b-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100%	111.11%	111.11%
4c-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	22%	2.15%	120.00%
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif			108.24%
5a-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	100%	100.57%	100.57%
5b-CP	Persentase produktivitas lelang	35.00%	36.60%	104.56%
5c-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	92.00%	99.20%	107.83%
5d-CP	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	12.50%	0.86%	120.00%
6	Edukasi yang efektif			104.43%
6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	89	92.94	104.43%
7	Pengawasan dan pengendalian yang efektif			117.65%
7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%	100.00%	117.65%
7b-CP	Persentase Rekomendasi hasil Pengawasan yang diitindaklanjuti			abu-abu

Kode	IKU	Target s.d. Q4	Realisasi s.d. Q4	Indeks Max. 120%
	Learning & Growth Perspective (30%)			33.84%
8	SDM yang kompeten			120.00%
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120.00%	120.00%
9	Organisasi yang fit for purpose			117.93%
9a-N	Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK/WBBM	85	97.43	114.62%
9b-N	Nilai hasil review pengelolaan kinerja	75	89.64	119.52%
11c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80	95.73	119.66%
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal			100.50%
10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95.5%	95.98%	100.50%
10b-N	Persentase tindaklanjut temuan BA 15			abu-abu
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)				109.48%

Penjelasan atas capaian 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dan 22 (dua puluh dua) IKU Kemenkeu-Three KPKNL Surakarta tahun 2021, selengkapnya diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Pengelolaan kekayaan negara yang optimal

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Surakarta mengidentifikasi 3 (tiga) IKU. Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagai berikut :

Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pengelolaan kekayaan negara yang optimal :

Indikator Kinerja Utama	Target		Capaian/Realisasi	
	(%)	(RpJuta)	(%)	(RpJuta)
Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%	62%	66.21%	66.21%
Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	20.614	98,436%	20.291,558
Persentase Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017)	100%	900	168,87%	1.519,797

1.a. Realisasi Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

Realisasi IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK, dengan hasil sebagai berikut:

Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Persentase pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%	66.21%	106,79%

Pengelolaan kekayaan negara yang optimal								
a. Tingkat Kesesuaian SBSK K/L Baru (2021)								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	-	50%	50%	55%	55%	62%	62%	Max/ TLK
Realisasi	66.5%	66.5%	65.1%	65.1%	66.2%	66.2%	66.5%	
Capaian		120 %	120 %	118 %	118 %	106,79 %	106,79 %	

Target tahun 2021 sebanyak 97 NUP satker Non Kemenkeu untuk pengukuran SBSK dan 156 NUP satker Kemenkeu untuk optimalisasi dan penggunaan SBSK. Pada Q1 KPKNL telah menyelesaikan pengukuran terhadap – BMN, kemudian secara bertahap proses terus berjalan untuk mencapai target tahunan sebesar 62% dan capaian sampai dengan Q4 sebesar 66,21%.

1.b. Realisasi Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang

Realisasi IKU ini dengan hasil sebagai berikut:

Pengelolaan kekayaan negara yang optimal								
b. Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	9.19%	31.7%	31.7%	52.3%	52.3%	98.4%	98.4%	
Capaian	91.94%	105,67 %	105,67 %	87,27 %	87,27 %	98,44 %	98,44 %	

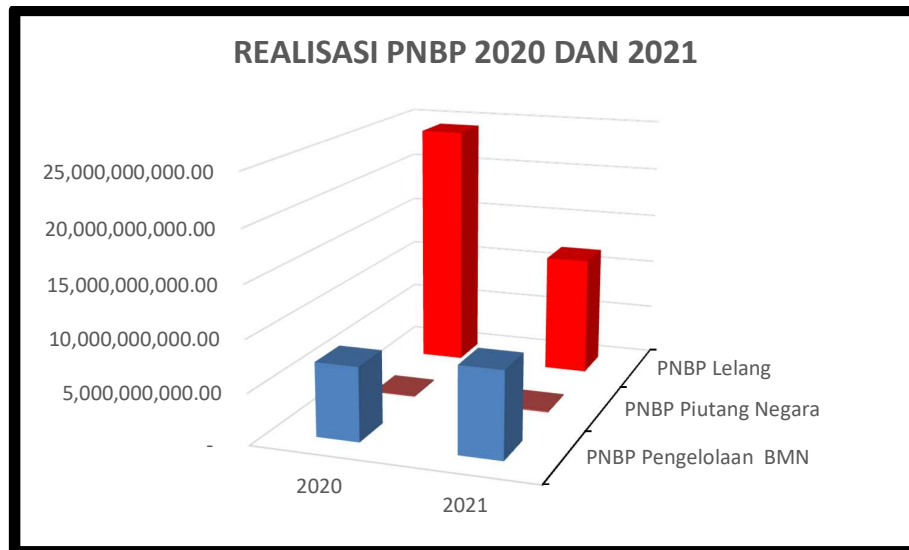
Kegiatan penghasil PNB	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PNBP Pengelolaan BMN	4,750,000,000	8,406,136,209	177%
PNBP Piutang Negara	64,000,000	121,647,420	190%
PNBP Lelang	15,800,000,000	11,763,775,297	74%

Tercapainya target PNB Pengelolaan BMN sebesar 177% adalah sebagian besar berasal dari pemanfaatan berupa sewa Rp 1.859.922.829,- , pemindahtanganan penghapusan Rp 4.881.204.376,- dan Rampasan Rp 1.665.009.004,- .

PNBP Piutang Negara sebesar 190 % adanya pembayaran/pelunasan piutang Negara, serta adanya program keringanan hutang.

Sedangkan tidak tercapainya target realisasi PNBP Lelang yaitu 74% disebabkan karena terlalu banyak lelang yang **“Tidak Ada Penawaran”** sehingga jumlah hasil lelang menjadi minim. Banyak pemohon lelang yang mencantumkan nilai limit sama dengan nilai pasar objek, sehingga masih cenderung tinggi dan Objek Lelang kurang marketable.

IKU REALISASI PNBP		2020	2021	SELISIH
a.	PNBP Pengelolaan BMN	7,186,901,955.00	8,406,136,209.00	1,219,234,254.00
b.	PNBP Piutang Negara	96,993,156.00	121,647,420.00	24,654,264.00
c.	PNBP Lelang	24,229,111,144.00	11,763,775,297.18	(12,465,335,846.83)
JUMLAH		31,513,006,255.00	20,291,558,926.18	(11,221,447,328.83)



Realisasi IKU Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang berupa PNBP Pengelolaan BMN, PNBP Piutang Negara, dan PNBP Lelang untuk tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 mengalami penurunan penerimaan sebesar Rp (11.221.447.328,83). Penurunan penerimaan tersebut akibat dari penurunan Bea lelang sedangkan untuk PNBP Pengelolaan BMN dan Piutang Negara mengalami kenaikan. Kondisi penurunan tersebut akibat banyaknya pelaksanaan lelang yang tidak laku.

1.c. Realisasi Tingkat Penurunan outstanding piutang negara

Realisasi IKU Tingkat Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017) diperoleh dari kegiatan Pengurusan Piutang Negara, dengan hasil sebagai berikut:

Outstanding BKPN Berkas sd 31 Des 2017	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Persentase Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017)	900,000,000	1,519,797,356.27	168.87%

Tercapainya target Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara (Saldo PNDS s.d. 31 Desember 2017) sebesar 168.87% ini, berasal Outstanding Outstanding BKPN s.d. 2017 per 31-12-2020 adalah 126 BKPN dengan nilai Rp15.951.441.627,00. Target Tingkat Outstanding Piutang Negara Tahun 2021 sebesar Rp 543.944.159,48,00 dan berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: ND-2689/KN.1/2021 tgl. 29 Juli 2021 telah direvisi menjadi Rp 900.000.000,00 Capaian target berasal dari pengembalian BKPN, PSBDT, Pelunasan dan pembayaran angsuran.

Capaian pada Triwulan IV Tahun 2021 adalah Rp1.519.797.356,27 (168,87%), capaian ini semakin meningkat dengan adanya beberapa Penanggung Hutang penyerahan sd tahun 2017 yang telah optimal pengurusannya dan berdasarkan penelitian lapangan ditindaklanjuti dengan PSBDT, adanya pembayaran angsuran dan pelunasan hutang sehingga menambah penurunan outstanding di TW IV 2021 sebesar Rp281.198.443,20.

Bahwa dalam pengurusan piutang Negara tersebut KPKNL Surakarta telah berupaya untuk melakukan Optimalisasi Pengurusan Piutang Negara, Di masa Pandemi COVID-9 dilakukan penagihan langsung sekaligus dengan penyampaian Surat Paksa dengan tetap memperhatikan protocol kesehatan serta dengan mengirimkan surat penyelesaian hutang kepada Negara yang ditujukan kepada PH/PjH dan Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-15/PMK.06/2021 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme *Crash Program* Tahun Anggaran 2021, telah dilakukan pemberitahuan Crash Program Penyelesaian Utang kepada Penanggung Hutang dan / atau Penjamin Hutang penyerahan dari instansi pemerintah pusat.

Target IKU-IKU di atas dapat tercapai karena koordinasi yang baik antara KPKNL Surakarta dengan satuan kerja (satker) Kementerian/Lembaga (K/L), dengan para penyerah piutang dan pemohon lelang, sehingga menghasilkan PNPB dan penetapan utilisasi kekayaan

negara dengan nilai yang signifikan, serta peningkatan kepedulian satker K/L mengenai utilisasi.

Action Plan atau rencana aksi KPKNL Surakarta di tahun 2021:

- a. Himbauan ke satker untuk melaporkan pemanfaatan (verifikasi data pemanfaatan/pemindahtanganan).
- b. Mengoptimalkan Penagihan Piutang Negara langsung maupun melalui surat karena masa pandemic dan melanjutkan *crash program* seandainya ada lagi.
- c. Sosialisasi Pengurusan Piutang Negara.
- d. Sosialisasi permohonan lelang *online* ke perbankan dan Kementerian/Lembaga.
- e. Penggalan Potensi lelang Non Eksekusi Sukarela, khususnya lelang UMKM.
- f. Sosialisasi terkait pengelolaan BMN, khususnya terkait pemanfaatan BMN.

Sasaran Strategis 2: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Dalam pencapaian sasaran strategis ini KPKNL Surakarta mengidentifikasi 2 (dua) IKU. Capaian IKU tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	88.00	95.27	108.26%
Persentase realisasi pokok lelang	100%	103.20%	103.20%

2.a. Realisasi IKU Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang, dengan hasil sebagai berikut:

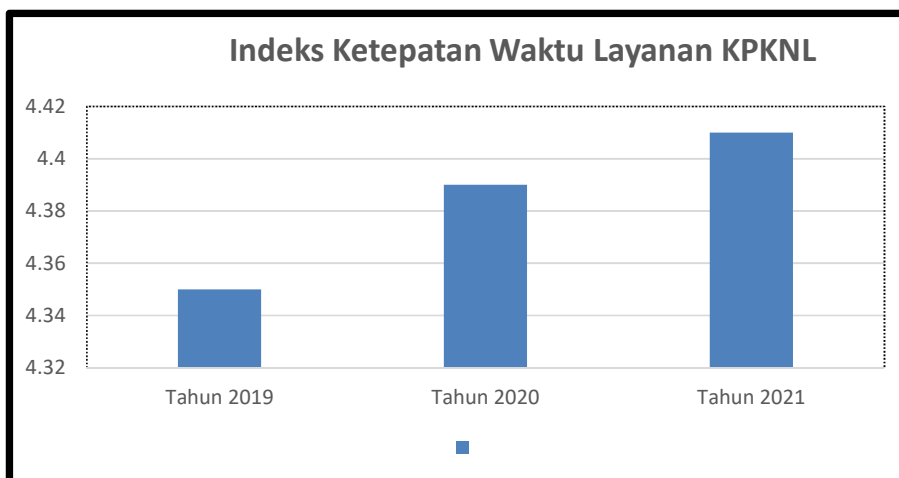
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/ K P
Target	88	88	88	88	88	88	88	Max/ Avera ge
Realisasi	95,28	94,92	95,10	95,04	95,08	95,27	95,27	
Capaian	108,27%	107,86%	108,07%	108%	108,05%	108,26	108,26	

Target rata-rata indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara tahun 2021 sebesar 88. Adapun realisasi s.d. Triwulan IV 2021 sebesar 95,27 atau 108,26% dari target.

Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan KPKNL

TAHUN 2019 – 2021

TAHUN	2019	2020	2021
Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan KPKNL	93.79	92.87	95.27



Realisasi IKU Indeks Ketepatan Waktu Layanan KPKNL Surakarta untuk tahun 2021 masih lebih tinggi/baik bila dibandingkan dengan tahun 2019 dan tahun 2020. Untuk tahun 2020 sempat mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019. Penurunan untuk tahun 2020 ini disebabkan banyaknya permohonan lelang yang mengalami keterlambatan penetapan jadwal lelang karena keterbatasan jumlah Pejabat Lelang yang ada. Tahun 2021 kembali naik, kondisi ini menandakan bahwa KPKNL Surakarta senantiasa berusaha untuk memberikan layanan yang sebaik-baiknya kepada para pengguna layanan.

2.b. Realisasi IKU Persentase realisasi pokok lelang, dengan hasil sebagai berikut:

Realisasi IKU Persentase Pokok Lelang, dengan hasil sebagai berikut:

Realisasi IKU ini berasal dari pokok lelang yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I dan Lelang Pegadaian di wilayah KPKNL Surakarta pada tahun 2021, dengan hasil sebagai berikut:

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Po/ K P
Target	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	11,45%	38,02%	38,02%	56,84%	56,84%	103,20%	103,20%	
Capaian	57,25%	95,04%	95,04%	81,20%	81,20%	103,20%	103,20%	

Target jumlah pokok lelang pada KPKNL Surakarta tahun 2021 adalah sebesar Rp311.000.000.000,00, Realisasi IKU tersebut sampai dengan triwulan IV adalah sebesar Rp320.954.750.947 yang terdiri dari:

- Rp231.775.144.747 (Pelelang KPKNL)
- Rp89.179.606.200 (Pegadaian)

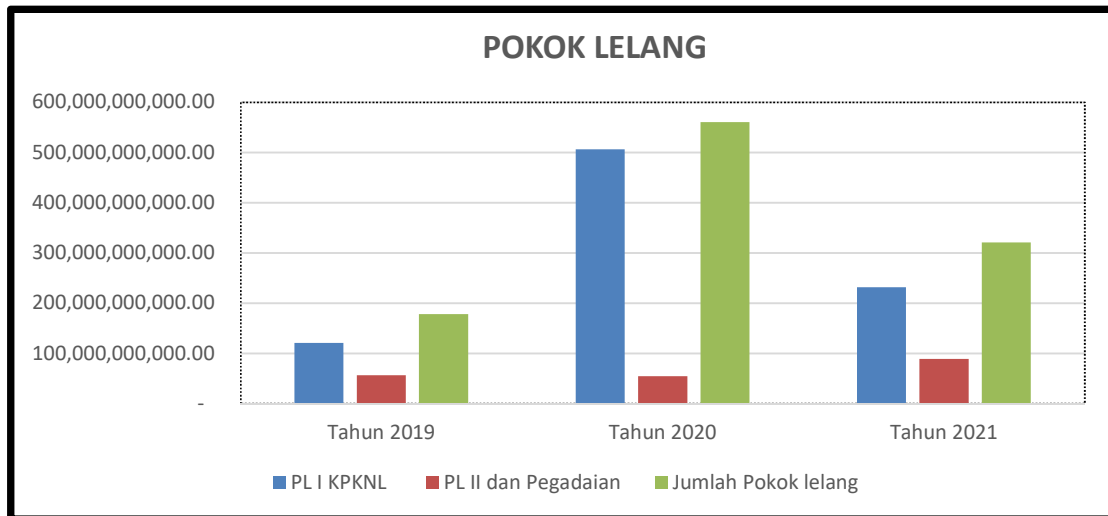
Sehingga realisasi hasil lelang KPKNL Surakarta sebesar **103,20 %** dari target.

Tercapainya Pokok lelang Pejabat lelang Kelas I sebesar 223% adalah berasal pelaksanaan lelang Eksekusi Kepailitan, Eksekusi Hak Tanggungan dan Penetapan Pengadilan, Penghapusan BMN dan lelang Kayu Perhutani.

Pokok Lelang KPKNL Surakarta dan Pegadaian

TAHUN 2019 – 2021

TAHUN		2019	2020	2021
a.	PL I KPKNL	121,049,539,426.00	505,908,883,921.00	231,775,144,747.00
b.	PL II dan Pegadaian	57,126,346,700.00	54,467,768,100.00	89,179,606,200.00
JUMLAH		178,175,886,126.00	560,376,652,021.00	320,954,750,947.00



Realisasi IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang KPKNL Surakarta untuk tahun 2021 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2020, tetapi masih lebih besar daripada tahun 2019. Pencapaian tahun 2020 yang tinggi karena banyak lelang yang bernilai besar dari lelang eksekusi harta pailit dan eksekusi Hak Tanggungan.

Sedangkan untuk pokok lelang yang berasal dari pegadaian relatif stabil kenaikannya tiap tahun.

Sasaran Strategis 3: Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien

Dalam pencapaian sasaran strategis ini KPKNL Surakarta mengidentifikasi 1 (satu) IKU. Capaian IKU tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Indeks kepuasan pengguna layanan	4.30	4.41	102.56%

Nilai indeks kepuasan pengguna layanan didapatkan dari kompilasi perhitungan hasil survei kepada para stakeholder pada seksi teknis, dengan data sebagai berikut :

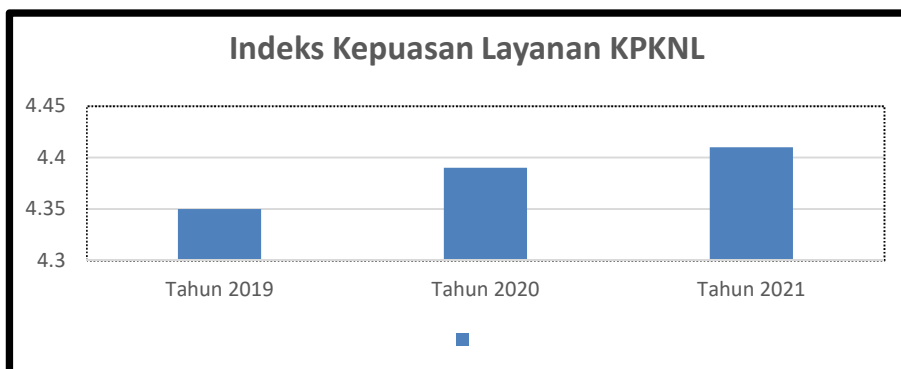
- Indeks kepuasan Seksi PKN : 4,48
- Indeks kepuasan Seksi Pelayanan Penilaian : 4,36
- Indeks kepuasan Seksi Piutang Negara : 4,44
- Indeks kepuasan Seksi Pelayanan Lelang : 4,34

Realisasi sebesar 4,41 diperoleh dari hasil survei yang dilakukan terhadap kepuasan pelanggan atas pelayanan yang diberikan KPKNL Surakarta kepada pengguna layanan (*stakeholder*), terutama atas penyelesaian layanan unggulan KPKNL Surakarta. Survei dilakukan dengan memberikan kuesioner yang berisi beberapa pertanyaan terkait pelayanan KPKNL kepada pengguna layanan. Capaian IKU tersebut mengindikasikan bahwa layanan KPKNL telah mampu memberi kepuasan/memenuhi harapan pengguna layanan/*stakeholder*.

Indek Kepuasan Penggunaan Layanan KPKNL

TAHUN 2019 – 2021

TAHUN	2019	2020	2021
Indeks Kepuasan Penggunaan Layanan KPKNL	4.35	4.39	4.41



Realisasi IKU Indeks Ketepatan Waktu Layanan KPKNL Surakarta untuk tahun 2019 s.d. tahun 2021 terus mengalami kenaikan tiap tahunnya, Hal ini menandakan bahwa KPKNL Surakarta Senantiasa berusaha untuk memberikan layanan yang sebaik-baiknya kepada para pengguna layanan.

Sasaran Strategis 4: Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Surakarta mengidentifikasi 3 (tiga) IKU. Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	100%	100.75%	100.75%
Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100%	111.11%	111.11%
Deviasi ketergunaan hasil penilaian	22%	2.15%	190.23%

4.a. Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan

Realisasi IKU ini berasal dari kegiatan Sertifikasi BMN berupa tanah pada kementerian dan lembaga Capainnya adalah sesuai tabel berikut:

No.	Uraian	Target	Realisasi	%
1	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	100%	100.75%	100.75%

Target tahun 2021 sebanyak 1.737 bidang tanah, s.d Q4 KPKNL telah menyelesaikan 1.750 dari target sertifikasi.

4.b. Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)

IKU ini berasal dari kegiatan pemanfaatan BMN untuk Fortofolio pada kementerian dan lembaga Capainnya adalah sesuai tabel berikut:

No.	Uraian	Target	Realisasi	%
1	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	27	30	111.11%

Target Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) adalah sebesar 100% (27 aset), dengan capaian tahun 2021 sebanyak 30 aset telah dievaluasi.

4.c. Deviasi ketergunaan hasil penilaian

IKU ini berasal dari kegiatan penilaian yang digunakan untuk dasar persetujuan dalam pengelolaan BMN, Capaiannya adalah sesuai tabel berikut:

No.	Uraian	Target	Realisasi	%
1	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	22%	2.15%	190.23%

Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.

Dari target yang ditetapkan sebesar 22%, Realisasi Tahun 2021 sebesar 2,15%.

Sasaran Strategis 5: Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Surakarta mengidentifikasi 4 (empat) IKU, dengan capaian sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	100%	100.57%	100.57%
Persentase produktivitas lelang	35.00%	36.60%	104.56%
Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	92.00%	99.20%	107.83%
Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	12.50%	0.86%	120.00%

5.a. Persentase efektivitas penyelesaian BKPN

Realisasi IKU ini berasal dari kegiatan Pengurusan Piutang Negara terhadap BKPN yang masih menjadi Outstanding KPKNL Surakarta, Capainnya adalah sesuai tabel berikut:

No.	Uraian	Target	Realisasi	%
	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	349	351	106.76%

penyelesaian BKPN untuk Tahun 2021 sebesar 349 BKPN, sedangkan realisasi s.d. Triwulan IV Tahun 2021 sebanyak 351 BKPN (100,57%).

5.b. Persentase produktivitas lelang

Realisasi IKU ini berasal dari tingkat pelaksanaan lelang laku dari total frekuensi lelang, adalah sesuai tabel berikut:

No.	Uraian	Target	Realisasi	%
1	Jumlah Frekuensi lelang Laku Secara keseluruhan		460	
	Jumlah Frekuensi lelang secara keseluruhan		1,257	
	% Lelang laku keseluruhan	35.00%	36.60%	104.56%

Frekuensi lelang sepanjang tahun 2021 pada KPKNL Surakarta sebanyak 1.257 kali, dengan total lelang yang laku sebanyak 460 kali. Sehingga realisasi produktivitas lelang KPKNL Surakarta pada tahun 2021 sebesar 36,60%. Tercapainya target ini banyak berasal dari Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, Pengadilan dan Lelang Sukarela.

5.c. Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction

Target capaian e-Auction dan e-Conventional Auction adalah sebesar 92 % dari realisasi frekuensi lelang, dengan catatan target e-Auction adalah minimal sebesar 92 % dari realisasi frekuensi lelang.

Sampai dengan triwulan IV tahun 2021, dari 1257 frekuensi lelang telah dilaksanakan *e-auction* sejumlah 1247 kali, dan lelang *e-conventional auction* sejumlah 0, sehingga realisasi triwulan IV sebesar 99,20%. Adapun 10 frekuensi lelang yang tidak *e-auction* adalah lelang kayu.

5.d. Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN

Realisasi IKU ini berasal dari selisih pencatatan/pembukuan antara laporan yang dibuat KPKNL Surakarta dengan data aplikasi OMSPAN yang dimiliki oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, adapun capaian IKU ini adalah sesuai tabel berikut:

No.	Uraian	Target	Realisasi	%
1	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	12.50%	0.86%	120.00%

Adapun selisih/deviasi 0.86 % tersebut adalah sebagai berikut:

Deviasi PNBPN		Deviasi PNBPN Lelang	
Focus PN	OMSPAN	Dropbox	OMSPAN
Rp 121.647.420	Rp 121.647.420	Rp 11.763.775.297	Rp 11.969.042.291
0,00%		1,71%	

Realiasi IKU deviasi untuk PNBPN yang berasal dari Bea Administrasi Pengurusan Piutang Negara (Biad PPN) adalah 0,00%, sedangkan PNBPN yang berasal dari Bea Lelang 1,71% yang berasal dari setoran-setoran bea lelang yang belum teridentifikasi, jadi untuk realisasi IKU Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN secara total keseluruhan adalah 0,86 dari Total PNBPN Biad PPN dan Bea Lelang.

Untuk kedepannya KPKNL Surakarta untuk semakin tertib Administrasi dan pelaporan sehingga tidak terdapat deviasi lagi antara penerimaan negara dan pembukuan pada KPKNL Surakarta.

Sasaran Strategis 6: Edukasi yang efektif

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Surakarta mengidentifikasi 1 (satu) IKU, dengan capaian sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	89	92.94	104.43%

Target tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi KPKNL Surakarta tahun 2021 sebesar 89. Capaian pada tahun 2021 tercapai sebesar 92.94 atau 104,43% dari target.

No	Seksi	Nilai Edukom	
		Semester 1	Semester 2
1	Seksi PKN	89,45	89,31
2	Seksi PN	92,07	94,73
3	Seksi Pelayanan Lelang	92,52	99,57
Rata-rata		91,35	94,54

Layanan edukasi dan komunikasi ini dilaksanakan oleh tiga seksi yang berhubungan langsung dengan stakeholder/penggunaan layanan KPKNL Surakarta. Pada masa pandemi karena tidak melayani tatap muka secara penuh, maka layanan dilaksanakan secara kombinasi antara tatap muka dan virtual/telepon dalam bentuk kegiatan yang berupa:

1. Edukasi dan komunikasi pada saat satker konsultasi tatap muka dan telepon (Seksi PKN).
2. Edukasi dan komunikasi terkait pengurusan piutang Negara dilakukan pada saat petugas melayani/ bertemu langsung stakeholder baik penyerah piutang, penanggung hutang dan juga pengguna jasa lainnya terkait piutang Negara dengan cara mengisi kuesioner. (Seksi PN).
3. Edukasi dan komunikasi pada saat pemohon lelang konsultasi tatap muka dan telepon (Seksi Pelayanan Lelang).

Sasaran Strategis 7: Pengawasan dan pengendalian yang efektif

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Surakarta mengidentifikasi 2 (dua) IKU,.
Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%	100.00%	117.65%
Persentase Rekomendasi hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti			Abu-abu

7.a. Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara

Realisasi IKU ini berasal dari tingkat tindak lanjut persetujuan/penetapan pengelolaan BMN adalah sesuai tabel berikut:

No.	Uraian	Target	Realisasi	%
1	Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2021 yang ditindaklanjuti oleh K/L		45	
2	Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester I 2021 yang ditindaklanjuti oleh K/L		31	
3	Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II 2021		45	
4	Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester I 2021		31	
	Capaian IKU	85 %	100%	

Target tahun 2021 sebesar 85%. Capaian Tahun 2021 sebesar 100%. Yang berarti semua persetujuan yang dikeluarkan oleh KPKNL Surakarta telah ditindaklanjuti semuanya oleh Satker Kementerian/lembaga.

7.b. Persentase Rekomendasi hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti

No.	Uraian	Target	Realisasi	%
1	Persentase Rekomendasi hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	-	-	-

Pada tahun 2021 tidak ada temuan/rekomendasi hasil pengawasan yang harus ditindaklanjuti oleh KPKNL Surakarta.

Sasaran Strategis 8: SDM yang kompeten

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Surakarta mengidentifikasi 1 (satu) IKU,.
Penjelasan mengenai capaian IKU tersebut adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	100.00%	120.00%

IKU ini adalah dalam rangka pengembangan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh KPKNL Surakarta. Dari 44 pegawai pelaksana yang sudah memenuhi standar kompetensi adalah sejumlah 44 (semua sudah memenuhi).

Sasaran Strategis 9: Organisasi yang fit for purpose

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Surakarta mengidentifikasi 3 (tiga) IKU,.
Penjelasan mengenai capaian IKU tersebut adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK/WBBM	85	97.43	114.62%
Nilai hasil review pengelolaan kinerja	75	89.64	119.52%
Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80	95.73	119.66%

9.a. Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK / WBBM

Bahwa tahun 2021 ini KPKNL Surakarta mengikuti penilaian sebagai Kantor yang berpredikat WBBM, nilai yang dicapai adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM	85	97.43	114.62%

Target nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM sebesar 85. IKU ini dihitung secara tahunan. Berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Penilai Kementerian Keuangan, KPKNL Surakarta mendapatkan nilai 97,43. Masih terdapat beberapa keluhan dari pengguna jasa KPKNL Surakarta, yang berpotensi untuk menurunkan nilai komponen

hasil survei ZI WBBM. Untuk tahun 2021 KPKNL Surakarta belum lolos untuk menyandang predikat WBBM, dan akan berusaha kembali meraih predikat tersebut pada tahun 2022.

9.b. Nilai hasil review pengelolaan kinerja

Target nilai hasil reuiu pengelolaan kinerja KPKNL Surakarta tahun 2021 sebesar 75. IKU ini dihitung secara tahunan, nilai yang dicapai adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Nilai hasil review pengelolaan kinerja	75	89.64	119.52%

Berdasarkan penilaian dari Kanwil DJKN Jawa Tengah dan DIY, nilai reuiu pengelolaan kinerja KPKNL Surakarta tahun 2021 adalah sebesar 89,64. Dengan rincian sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	NILAI	BOBOT	NILAI SETELAH PEMBOBOTAN
1	Perencanaan	100,00	25%	25,00
2	Pelaksanaan/Eksekusi	90,47	30%	27,14
3	Monitoring dan Evaluasi	85,00	30%	25,50
4	Edukasi	80,00	15%	12,00
NILAI HASIL REVIU				89,64

9.c. Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator

Target efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator KPKNL Surakarta tahun 2021 sebesar 80. IKU ini dihitung secara tahunan, nilai yang dicapai adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80	95.73	119.66%

FGD telah dilakukan 4 kali dengan capaian Triwulan I: 93,4, Triwulan II: 94,5, Triwulan III: 96 dan Triwulan IV: 99. Sehingga rata-rata indeks pada tahun 2021 sebesar 95.73 atau 119.66% dari target tahunan.

Sasaran Strategis 10: Pengelolaan Keuangan yang Optimal

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Surakarta mengidentifikasi 1 (satu) IKU. Sedangkan untuk temuan BA 15 tidak ada, Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95.5%	95.98%	100.50%

IKU ini mengukur kualitas dalam pengelolaan anggaran yaitu kesesuaian dalam perencanaan dan pembelanjaan anggaran. Beberapa kegiatan yang diukur pada IKU ini adalah Capaian Belanja, tingkat efisiensi, konsistensi perencanaan dan pelaksanaan belanja, penyelesaian tagihan belanja dan data kontrak. Secara umum, kualitas pelaksanaan anggaran KPKNL Surakarta cukup baik dan sudah mencapai target yang ditetapkan.

B. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2021, KPKNL Surakarta mendapatkan anggaran total sebesar Rp1.725.415.000,00. Anggaran tersebut terdiri dari belanja barang sebesar Rp1.695.675.000,00 dan belanja modal sebesar Rp29.740.000,00. Sedangkan untuk belanja pegawai sebesar Rp0,00 karena untuk belanja pegawai sudah tersentralisasi di Kantor Pusat DJKN.

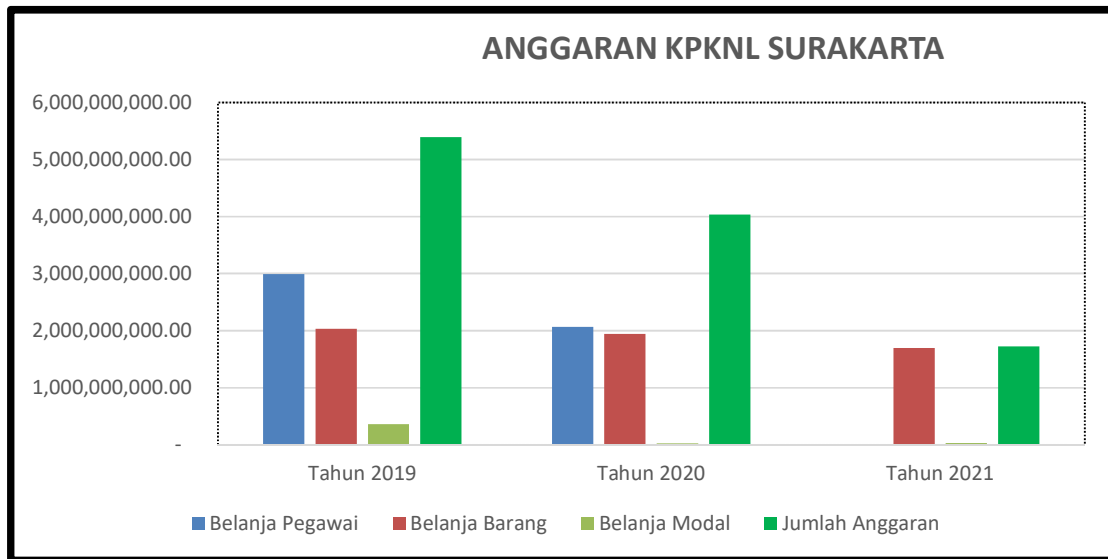
Realisasi anggaran tahun 2021 dapat dijelaskan sesuai table berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
Belanja pegawai	0	0	0%
Belanja barang	1.695.675.000	1.663.469.627	98%
Belanja modal	29.740.000	29.740.000	100%
Jumlah Anggaran	1.725.415.000	1.693.209.627	98%

Bahwa dari jumlah Anggaran Rp. 1.725.415.000,00 tersebut dapat dibelanjakan sebesar Rp 1.693.209.627,- atau 98 %.

Perbandingan Anggaran KPKNL Surakarta Tahun 2019 s.d. 2021

TAHUN	2019	2020	2021
a. Belanja Pegawai	2,993,479,000.00	2,070,685,000.00	-
b. Belanja Barang	2,033,421,000.00	1,943,954,000.00	1,695,675,000.00
c. Belanja Modal	361,646,000.00	22,000,000.00	29,740,000.00
JUMLAH	5,388,546,000.00	4,036,639,000.00	1,725,415,000.00



Apabila dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, bahwa untuk tahun 2021 ini mengalami penurunan Anggaran khususnya dibelanja barang. Menurunnya anggaran belanja ini karena adanya refocusing dari Kementerian Keuangan. Namun demikian dengan terbatasnya anggaran program kerja KPKNL Surakarta masih dapat terlaksana.

BAB IV PENUTUP

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang dicapai KPKNL Surakarta tahun 2021 ini adalah sebesar 109,48%. Capaian NKO ini merupakan hasil kerja keras seluruh pejabat dan pegawai KPKNL Surakarta. Selain itu, dari total 22 (dua puluh dua) IKU Kemenkeu-*Three* KPKNL Surakarta, 19 (sembilan belas) IKU berstatus hijau dan 1 (satu) IKU berstatus kuning.

1. IKU yang memperoleh hasil maksimal dengan persentase capaian kinerja $\geq 100\%$ (hijau) sebanyak 19 (Sembilan belas) IKU, yaitu:
 - a. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK;
 - b. Persentase Penurunan outstanding piutang negara;
 - c. Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang;
 - d. Persentase realisasi pokok lelang;
 - e. Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan;
 - f. Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset);
 - g. Deviasi ketergunaan hasil penilaian;
 - h. Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN;
 - i. Persentase produktivitas lelang;
 - j. Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction;
 - k. Deviasi Data PNBPFungsional DJKN;
 - l. Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi;
 - m. Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara;
 - n. Persentase tindak lanjut penyelesaian/perbaikan atas sisa aset objek penilaian kembali BMN
 - o. Persentase pengembangan kompetensi pegawai;
 - p. Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK/WBBM;
 - q. Nilai hasil review pengelolaan kinerja;
 - r. Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator;
 - s. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran.
2. IKU yang memperoleh hasil $> 80\%$ dan $< 100\%$ (kuning) sebanyak 1 (satu) IKU, yaitu Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang;
3. IKU yang memperoleh hasil $> 80\%$ (merah) sebanyak nihil; dan
4. IKU yang tidak dapat diperhitungkan (berstatus abu-abu) sebanyak 2 dua (dua).

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang, antara lain:

1. Pengelolaan kekayaan Negara
 - a. Meningkatkan sosialisasi dan komunikasi yang intensif antara KPKNL dengan satker K/L dalam pengelolaan BMN sehingga tercapai hasil yang optimal;
 - b. Meningkatkan koordinasi dan mendorong komunikasi yang lebih efektif antara KPKNL, satker dan Kantor Pertanahan dalam rangka sertifikasi tanah BMN;
 - c. Meningkatkan kapasitas, pengetahuan dan penguasaan peraturan pengelolaan BMN melalui kegiatan *capacity building*, diklat teknis, maupun kegiatan lainnya.
2. Pengurusan piutang Negara
 - a. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antara KPKNL dengan Penyerah Piutang;
 - b. Inovasi/terobosan/ide baru dalam pengurusan piutang Negara, misalnya penagihan dengan pendekatan sosial/keagamaan.
3. Pelayanan lelang
 - a. Mengintensifkan pemasaran obyek lelang bekerja sama dengan pemohon lelang;
 - b. Meningkatkan kapasitas para Pelelang secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknis agar tercipta kesamaan pemahaman mengenai peraturan/ketentuan lelang;
 - c. Pembinaan dan pengawasan terhadap Pelelang secara intensif.
 - d. Sosialisasi layanan permohonan lelang *online*.
 - e. Penggalan Potensi lelang UMKM.
4. Pelayanan penilaian
 - a. Melakukan *knowledge sharing* dan diskusi internal tentang penilaian untuk menjaga dan meningkatkan pengetahuan para penilai;
 - b. Diklat penyegaran tentang penilaian.
5. Bagian Umum
 - a. Asistensi pengelolaan DIPA dari Subbagian Umum kepada Seksi lain untuk menjaga kualitas pelaksanaan anggaran;
 - b. Konsultasi pengelolaan DIPA dengan Kanwil Perbendaharaan dan/atau KPPN.
6. Kepatuhan Internal

Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pegawai pada tugas-tugas Seksi Kepatuhan Internal.
7. Hukum dan Informasi

Meningkatkan peran fungsi kehumasan dalam menyebarluaskan informasi tugas dan fungsi KPKNL Surakarta.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun, semoga dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai tugas fungsi KPKNL Surakarta kepada seluruh pihak yang terkait, sehingga diharapkan dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada

periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja ini dapat menjadi cermin dan evaluasi serta diharapkan memacu kinerja organisasi yang lebih baik, dan secara eksternal Laporan Kinerja ini menjadi indikator kinerja organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pelayanan terhadap *stakeholders*. Harapannya adalah masyarakat luas dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari eksistensi dan pelayanan yang diberikan oleh KPKNL Surakarta.

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
- LAMPIRAN 2 : PERJANJIAN KINERJA